



## **Community Development in Barak's Slum Area Towards a Healthy and Livable Neighborhood in Kotabaru**

**Hanny Maria Caesarina\***

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin  
Kabupaten Barito Kuala, Indonesia

**Irfan Zamzani**

Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin  
Kabupaten Barito Kuala, Indonesia

**Cici Maryani Widayanti**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin  
Kabupaten Barito Kuala, Indonesia

**Muhammad Rizqi Fatullah**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin  
Kabupaten Barito Kuala, Indonesia

\*corresponding author: [hanny.planarch@gmail.com](mailto:hanny.planarch@gmail.com)

**Keywords:**

Community development,  
Slum area,  
Barak,  
livable,  
neighborhood

**ABSTRACT**

The Kotabaru District Government has a plan to improve the slum area in the Barak area, Dirgahayu village, North Laut Island sub-district. This received pro and con reactions from the local community. This community service activity seeks to empower local communities in the Barak area about the importance of a healthy and livable residential environment. The methods used are observation, interviews and giving exposure to the Barak community to understand the current conditions of the Barak slum area and the responses of the people living in it. At the end of the activity, the percentage of people who rejected the plan to improve the quality of the Barak slum area dropped from 64% to 36%. Meanwhile, the percentage of people who agreed increased from 40% to 60% with the suggestion that improvement plans should pay attention to the social, cultural and economic aspects of the local community. In addition, the development plan for the relocation of the Barak slum area must pay attention to the balance between open space, built-up areas, and regional-scale public infrastructure.

## PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan Kalimantan Selatan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan Kalimantan Selatan yang rata-rata permukimannya berada di tepian sungai maupun kawasan pesisir mengakibatkan ketidakseimbangan rasio antara kawasan terbangun dan tidak terbangun (Caesarina and Rahmani, 2019a; Caesarina, 2020; Caesarina and Rahmani, 2021). Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kelayak hunian sebuah kawasan perumahan dan dapat memberikan dampak negatif seperti potensi terjadinya banjir, kebakaran, maupun masalah sosial lainnya.

Dengan berjalaninya waktu, kecenderungan pembangunan perumahan di lokasi yang seharusnya tidak difungsikan lagi sebagai kawasan perumahan ini mendorong terbentuknya suatu kawasan permukiman yang termasuk kategori kumuh (Henson *et al.*, 2020; Surya *et al.*, 2021). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, ada beberapa indikator perumahan kumuh. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016; Public Work and Housing and Human Settlements, 2018).

Berbagai kondisi tersebut tak urung menjadikan beberapa kawasan perumahan dan permukiman di Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori kawasan kumuh (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016). Berdasarkan hal tersebut, maka alternatif pengembangan Rumah Susun (Rusun) (Dhiya Ulhaq, Idawati and Safwan, 2023) maupun rumah deret (Nurdiansyah, 2018) merupakan salah satu solusi pada lahan terbatas perkotaan di Kalimantan Selatan yang memungkinkan lebih banyaknya penyediaan ruang terbuka hijau sehingga proporsi bangunan dan ruang terbuka menjadi seimbang.

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang memiliki banyak daya tarik. Letak geografis dan potensi alam yang dimiliki kabupaten ini, juga membuat sektor perikanan menjadi salah satu komoditas utama dari Kotabaru. Perkembangan perkotaan Kotabaru sendiri berupa kawasan pusat bisnis (*Central Busniness District/CBD*) terpusat di kecamatan Pulau Laut Utara (Kotabaru, 2012) yang kawasan perkotaannya didominasi oleh kawasan pesisir pantai. Mayoritas penduduk asli Kotabaru berprofesi sebagai nelayan, sehingga perkembangan permukiman di kawasan pesisir adalah menjadi hal yang lumrah di Kotabaru. Apabila di kawasan perkotaan pada umumnya ditemui banyak mobil ataupun kendaraan bermotor lainnya yang parkir di kawasan permukiman, maka di Kotabaru yang terlihat adalah banyaknya perahu nelayan yang berjejer di parkiran depan rumah mereka.

Total luas kawasan kumuh di Kabupaten Kotabaru adalah 118,35 Ha dan sekitar 53% dari total luas tersebut atau 62,75 Ha terletak di kecamatan Pulau Laut Utara (Bupati Kotabaru, 2020). Sehingga, tak dapat dipungkiri bahwa pada kecamatan Pulau Laut Utara, masih banyak terdapat kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan intensif. Salah satunya yang sangat dikenal oleh masyarakat lokal adalah kawasan "Barak". Kawasan Barak ini merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh masyarakat yang ditimpung dari kejadian kebakaran di tahun 1993. Meskipun peristiwa tersebut telah meluluh lantakkan keseluruhan rumah yang ada di tempat kejadian, namun masyarakat lokal tetap bersikukuh membangun kembali rumah mereka di kawasan tersebut. Hal ini tidak lepas dari dominasi profesi masyarakat Barak sebagai nelayan yang cenderung lebih memilih tinggal di kawasan yang langsung terhubung dengan laut lepas.

Di sisi lain, sebagai wujud upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, alternatif relokasi melalui Rumah Susun (Rusun), rumah deret dan berbagai peningkatan kualitas lingkungan lainnya dihadirkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Rencana relokasi ini tentu saja mendapatkan berbagai pro dan kontra dari penduduk lokal. Penolakan dari masyarakat lokal terhadap rencana Pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh mereka memang kerap terjadi. Beberapa kondisi serupa terjadi pula di beberapa daerah di Indonesia, di mana masyarakat memiliki tingkat resistensi yang tinggi terhadap rencana peningkatan kualitas kawasan kumuh (Purwanto, Sugiri and Novian, 2017; Annisa Amalia, 2018;

Kamil, 2018; Widyastuty and Ramadhan, 2019; Caesarina, Rachmania and Azzahrah, 2022). Pendekatan khusus melalui pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi alternatif yang harus dikembangkan dalam penanganan kawasan kumuh (Surya *et al.*, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberdayakan masyarakat di Desa Dirgahayu terhadap rencana peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh menjadi kawasan yang sehat dan layak huni. Dengan kegiatan ini, pemahaman penduduk lokal terhadap pentingnya lingkungan tempat tinggal yang layak huni diharapkan dapat meningkat.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu pada bulan Februari-Maret 2023 yang meliputi beberapa tahapan kegiatan yang meliputi pelibatan penduduk lokal di RT 17, 21 dan 22 dan Pembakal/Kepala Desa, serta ketua-ketua RT Desa Dirgahayu.

### **Rekapitulasi Data Kawasan Kumuh Barak**

Pada bulan pertama dilakukan pendataan ulang indikator kumuh terhadap keseluruhan penduduk yang bermukim di RT 17, 21 dan 22 melalui kegiatan observasi dan survey lapangan yang dibarengi dengan *in-depth interview*. Pada tahap ini, didapatkan data keseluruhan penduduk yang tinggal di kawasan Barak. Termasuk data detail pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya untuk mendapatkan gambaran kondisi perekonomian masyarakat Barak. Hasil yang didapatkan adalah profil kawasan kumuh Barak. Data ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan daerah (Caesarina and Rahmani, 2019b) Kotabaru ke depannya.

Setelah didapatkan data terbaru masyarakat di RT 17, 21 dan 22, Langkah berikutnya adalah menghimpun tanggapan masyarakat berupa kritik dan saran yang membangun terhadap rencana peningkatan kawasan Barak melalui pembangunan unit Rusun. Tanggapan masyarakat lokal atau persepsi masyarakat diperlukan untuk mengetahui gambaran dasar terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan

### **Paparan Pentingnya Kawasan Permukiman Sehat dan Layak Huni**

Pada bulan ke-dua, dilakukan penyampaian informasi mengenai pentingnya kawasan permukiman yang sehat dan layak huni untuk masa depan yang lebih baik kepada masyarakat RT 17, 21 dan 22 dengan menggunakan metode ceramah bersama beberapa tokoh masyarakat di Desa Dirgahayu yang terjadwal di bulan Maret. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendampingan masyarakat

### **Hasil Evaluasi Tanggapan Masyarakat Barak**

Merupakan penjaringan pemahaman akhir masyarakat Barak dengan menggunakan kuesioner yang bertujuan menarik kesimpulan tentang kepedulian masyarakat Barak terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman mereka untuk dibandingkan dengan hasil aspirasi awal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rekapitulasi Data Kawasan Kumuh Barak**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/550/KUM/2020, ada 3 (tiga) Rukun Tetangga yang termasuk dalam kawasan permukiman kumuh, yaitu RT 17, 21 dan 22. Kondisi permukiman eksisting yang sangat rapat dan hanya menyisakan jalur sirkulasi sekitar 60 cm membuat kawasan Barak sangat rentan terhadap berbagai resiko bencana seperti kebakaran dan gelombang pasang. Minimnya ruang terbuka hijau pun menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penataan lingkungan kawasan tepian. Selain itu, kondisi permukiman yang masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sanitasi dan air bersih membuat kawasan Barak termasuk kategori rumah tidak layak huni. Hal ini ditambah lagi dengan mayoritas penduduk Barak yang tidak memiliki aspek legalitas kepemilikan lahan tempat tinggal mereka.

Dari hasil identifikasi didapatkan kesimpulan bahwa ketiga RT yang ada di Desa Dirgahayu termasuk dalam kawasan kumuh kategori sedang. Keseluruhan masyarakat yang tinggal berjumlah 662 Kepala Keluarga dengan total populasi mencapai 1992 jiwa. Terlihat bahwa kepadatan penduduk di kawasan Barak mencapai sekitar 271 jiwa/Ha dan memperlihatkan angka backlog yang sangat tinggi mengingat dari hasil indikator kumuh pun kawasan Barak termasuk kawasan permukiman tidak layak huni. Terlihat dari Tabel 1 di bawah ini, kondisi kepadatan

bangunan yang sangat tinggi dan tidak adanya pemenuhan sanitasi, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, jaringan jalan hingga tidak adanya sistem proteksi kebakaran menunjukkan bahwa kawasan Barak memerlukan penanganan yang tepat.

**Table 1. Rekapitulasi Data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Desa Dirgahayu**

Indikator	RT 17	RT 21	RT 22
Luas Wilayah	3,4 Ha	1,87 Ha	2,06 Ha
Jumlah Bangunan	60	260	94
Jumlah Kepala Rumah Tangga/Keluarga	308 (308 MBR)	248 (248 MBR)	92 (92MBR)
Jumlah Penduduk	808	883	301
Rata-rata KDB	90-100 %	100 %	100
Rata-rata KDH	0 %	0 %	0 %
Rata-rata Tinggi Bangunan	1-2 lantai	1-2 lantai	1-2 lantai
Pemenuhan Kebutuhan air bersih	100	100	100
Pemenuhan sanitasi	100	100	100
Drainase Lingkungan baik	0	0	0
Pengelolaan Sampah	0	0	0
Ketersediaan sarana-prasarana proteksi0 kebakaran	0	0	0
Kondisi jaringan jalan yang baik	0	0	0
Legalitas Tanah	Legal Milik Provinsi KalSel	Ilegal	Ilegal

Sumber: Analisa, 2023

Adapun dari hasil wawancara terkait kondisi perekonomian masyarakat Barak, diketahui bahwa kisaran penghasilan bulanan antara Rp.500.000,- sampai dengan kisaran maksimal Rp.2.000.000,- dan Rp.5.000.000,-. Dengan kisaran pengeluaran bulanan Rp.300.000,- hingga Rp.4.000.000,-. Penghasilan tersebut didapatkan dari latar profesi yang berbeda-beda. Mayoritas masyarakat RT 17, 21 dan 22 bekerja sebagai Nelayan, buruh, berdagang dan bekerja serabutan. Banyak pula dari masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak menentu. Terlebih lagi bagi yang berprofesi sebagai nelayan. Pada saat musim ikan, maka pendapatan mereka bisa meningkat 200% dari waktu-waktu lainnya. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik apabila mereka menemui saat-saat cuaca buruk yang mengakibatkan mereka tidak dapat berlayar. Hal ini langsung berdampak terhadap penghasilan bulanan para nelayan.

Dari Figure 1 terlihat bahwa sekitar 47% masyarakat Barak memiliki pendapatan yang sama dengan pengeluaran setiap bulannya. Artinya hampir separuh dari masyarakat Barak hanya dapat memenuhi keperluan sehari-hari dan tidak dapat memiliki tabungan masa tua. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan ke depannya untuk peningkatan produktivitas masyarakat.



**Figure 1. Persentase Perbandingan pendapatan dan pengeluaran masyarakat penghuni kawasan Barak**



**Figure 2. Proses Pendataan Aspirasi Masyarakat Barak**

Sedangkan dari hasil observasi dan wawancara (Figure 2 dan Tabel 2) diketahui bahwa masyarakat Barak memiliki berbagai alasan penolakan terhadap rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Terlebih lagi terhadap kemungkinan pembangunan Rusun yang dianggap mereka tidak bersahabat dengan kehidupan lokal di Kotabaru. Mereka yang tidak setuju rata-rata beralasan bahwa tidak akan sanggup membayar biaya relokasi meskipun diberlakukan sistem sewa. Apabila rencana peningkatan kualitas dilakukan dengan pembangunan Rusun, masyarakat keberatan dengan alasan sulitnya naik turun tangga, takut ketinggian, hingga kesulitan melakukan kegiatan sosial seperti pertemuan keluarga ataupun menggelar upacara kematian mengingat ruang yang sangat terbatas.

**Table 2. Tanggapan Masyarakat Barak**

Aspek	Masyarakat yang Setuju	Masyarakat yang Tidak Setuju
Sarana Umum	Pelayanan Dilengkapi fasilitas umum seperti tempat ibadah, taman, tempat berjualan, klinik kesehatan	
Iuran	Mengharapkan iuran per bulan murah Bebas iuran bulanan / gratis	Tidak sanggup membayar biaya sewa bulanan, maksimal hanya mampu membayar listrik dan air
Lokasi	Tempat Barak sekarang Manula diprioritaskan di lantai dasar	
	Banyak bukaan dan jendela untuk penerangan Air dan listrik lancar	Lebih memilih rumah deret Takut Ketinggian
Kualitas hunian	Tersedia tempat jemur Kamar banyak untuk anak-anak Lingkungan bersih dan indah – tersedia tempat parkir Disediakan sistem persampahan yang layak	Bangunan tinggi tidak aman untuk keluarga yang memiliki banyak anak Tidak suka naik turun tangga dan berjalan jauh Takut kesulitan saat ada upacara kematian
Keamanan Kenyamanan	dan Terhindar dari bahaya kebakaran dan banjir Aman dari kriminalitas	Sudah nyaman dengan kondisi saat ini

Sumber: Analisa, 2023

### **Pentingnya Kawasan Permukiman Sehat dan Layak Huni**

Setelah mendapatkan tanggapan awal masyarakat, maka dilakukan pemberian paparan mengenai hasil identifikasi terbaru terkait indikator kumuh pada kawasan Barak dan paparan pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kumuh untuk menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni di masa sekarang maupun yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain standar teknis kawasan permukiman dan lingkungan yang berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka hijau, intensitas pemanfaatan lahan yang harus berimbang antara kawasan terbangun dan tidak terbangun, pelibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, serta penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan permukiman perkotaan (Hussain *et al.*, 2019; Caesarina, 2020; Caesarina and Aina, 2021). Permukiman yang sehat dan layak huni dapat mendukung perekonomian lokal, menciptakan lingkungan yang sehat dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus masyarakat.



**Figure 3. Paparan Pentingnya Kawasan Permukiman Sehat dan Layak Huni**

Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh sejatinya memang harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Masyarakat Barak memahami pentingnya permukiman yang sehat dan layak huni, mengingat kondisi eksisting kawasan Barak yang memiliki banyak permasalahan lingkungan seperti selalu terdampak gelombang pasang, sistem sanitasi dan utilitas yang belum memadai, hingga sistem persampahan dan pengaman kebakaran yang belum tersedia.

Harapan masyarakat Barak adalah Pemerintah Daerah dapat mengimbangi rencana peningkatan kualitas fisik lingkungan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat mendorong munculnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), khususnya yang dapat memberikan keuntungan bagi nelayan setempat seperti lokakarya pembuatan dan pengemasan ikan asing, cara efektif pemasaran produk melalui sosial media, maupun pelatihan produk olahan hasil laut yang dapat menjadi komoditas pemasaran skala regional hingga ekspor.

Adapun untuk peningkatan kualitas lingkungan, tak lupa masyarakat mengharapkan adanya penyediaan ruang terbuka yang dapat difungsikan sebagai area resapan yang menjadi mitigasi bencana gelombang pasang maupun banjir, taman yang dapat digunakan pula sebagai tempat rekreasi maupun ruang jemur ikan, serta penyediaan sarana maupun prasarana pelayanan umum yang masih diperlukan masyarakat Barak. Mereka pun masih mengharapkan pertimbangan alternatif lain selain pembangunan Rusun, seperti pembangunan rumah Koppel ataupun rumah deret yang berimbang dengan penyediaan ruang terbuka.

#### Hasil Evaluasi Tanggapan Masyarakat Barak

Hasil evaluasi tanggapan masyarakat Barak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada saat pendataan awal didapatkan persentase masyarakat Barak yang menolak jumlahnya lebih banyak daripada persentase yang mendukung rencana peningkatan kualitas lingkungan oleh Pemerintah daerah.

Setelah diberikan paparan dan pemahaman terhadap pentingnya permukiman yang sehat dan layak huni, persentase masyarakat yang menolak turun dari yang tadinya 64% menjadi 36%. Sedangkan persentase masyarakat yang menyetujui rencana peningkatan kualitas kawasan kumuh Barak meningkat dari 40% menjadi 60% (Figure 4).

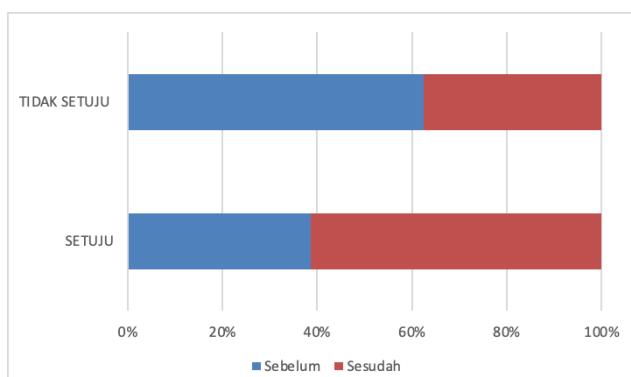


Figure 4. Perbandingan Persentase Tanggapan Masyarakat Barak (Sumber: Analisa, 2023)

#### KESIMPULAN

Kecenderungan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh adalah menolak rencana-rencana peningkatan kualitas maupun upaya pencegahan permukiman kumuh. Hal ini tentunya memerlukan pendekatan yang lebih spesifik seperti menyesuaikan dengan kondisi lokal sosial budaya wilayah yang akan dikembangkan. Masyarakat Barak yang tinggal di desa Dirgahayu adalah penduduk lokal yang awalnya sangat menolak keberadaan rencana pengembangan maupun pembangunan di desa Dirgahayu untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh. Setelah diberikan hasil identifikasi terbaru dengan interaksi langsung melalui observasi dan *in-depth interview* serta paparan pemahaman mengenai pentingnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni, terlihat bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang memiliki kualitas lebih baik.

Keterbatasan ruang menjadi hal penting yang menjadi perhatian masyarakat Barak, sehingga diharapkan rencana peningkatan kualitas lingkungan yang ditawarkan Pemerintah Daerah dapat memperhatikan penyediaan ruang terbuka untuk aktivitas nelayan desa Dirgahayu.

Hal-hal yang perlu diakomodir dalam rencana peningkatan kualitas kawasan kumuh Barak adalah pentingnya mengangkat issue-issue sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Program relokasi kawasan kumuh tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat lokal, sehingga ke depannya kegiatan serupa dapat melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat ini menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pembakal dan masyarakat Barak, khususnya penduduk RT 17, 21 dan 22 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atas kerja sama, keaktifan dan partisipasi pada keseluruhan kegiatan ini.

## REFERENSI

- Annisa Amalia, A. (2018) 'Karakteristik Hunian Permukiman Kumuh Kampung Sapiria Kelurahan Lembo Kota Makassar', *Nature : National Academic Journal of Architecture*, 5(1), pp. 13–22. Available at: <https://doi.org/10.24252/nature.v5i1a2>.
- Bupati Kotabaru (2020) 'Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/550/KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotabaru tahun 2020'. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Caesarina, H.M. (2020) 'Green Space Conceptual Design for the Neighbourhood of Settlements along Martapura River in Banjarmasin', *Ruang*, 6(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.14710/ruang.6.1.1-10>.
- Caesarina, H.M. and Aina, N. (2021) *Alternatif Ruang Terbuka Hijau Untuk Permukiman Bantaran Sungai Kawasan Perkotaan*, MBUnivPress. Available at: <https://doi.org/10.35747/MBUP.4>.
- Caesarina, H.M., Rachmania, A. and Azzahrah, S. (2022) 'Built Environment Upgrading Recommendation for Slum Settlement in Pelambuan, Kuin Cerucuk, and Teluk Dalam District', *OMNICODE Journal (Omnicompetence Community Developement Journal)*, 2(1), pp. 5–10.
- Caesarina, H.M. and Rahmani, D.R. (2019a) 'Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Kota Hijau di Perkotaan Martapura', *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 4(1), p. 7.
- Caesarina, H.M. and Rahmani, D.R. (2019b) 'The Supervision of Built Environment and Green Space Data Collection for Village's Profile in Semangat Bakti Village, Barito Kuala', *Comment: an International Journal of Community Development*, 1(2), pp. 48–52.
- Caesarina, H.M. and Rahmani, D.R. (2021) 'Keterkaitan Permukiman Tepi Sungai dan Ruang Terbuka Hijau- Biru terhadap Kerentanan Bencana Banjir di Kota Kasongan Kalimantan Tengah', in *Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana. Seminar Nasional Plano Earth 2*, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, pp. 88–92.
- Dhiya Ulhaq, T.L., Idawati, D.E. and Safwan, S. (2023) 'Perancangan Rusunawa di Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, 6(4), pp. 108–112. Available at: <https://doi.org/10.24815/jimap.v6i4.21213>.
- Henson, R.M. et al. (2020) 'Evaluating the health effects of place-based slum upgrading physical environment interventions: A systematic review (2012–2018)', *Social Science & Medicine*, 261, p. 113102. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113102>.
- Hussain, T. et al. (2019) 'The Effect of Sustainable Urban Planning and Slum Disamenity on The Value of Neighboring Residential Property: Application of The Hedonic Pricing Model in Rent Price Appraisal', *Sustainability*, 11(4), p. 1144. Available at: <https://doi.org/10.3390/su11041144>.
- Kamil, I. (2018) 'Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), pp. 129–139. Available at: <https://doi.org/10.29313/mediator.v11i1.3322>.
- Kotabaru, P.K. (2012) *Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032*.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016) 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh'. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Nurdiansyah, A. (2018) 'Urban Slum Upgrading Policy In Jakarta (Case Study: Kampung Deret Program Implementation)', *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 3(1), p. 19. Available at: <https://doi.org/10.14710/ijpd.3.1.19-31>.
- Pemerintah Provinsi KalSel (2021) 'RPJMD Kalimantan Selatan tahun 2021-2026'.

- Public Work and Housing, Mi. and Human Settlements, D.G. (2018) *Indonesia - National Urban Slum Upgrading Program*. Revised SFG1777. Indonesia: the World Bank, p. 200. Available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/689271468044640517/Indonesia-National-Urban-Slum-Upgrading-Program-Project-environmental-and-social-management-framework>.
- Purwanto, E., Sugiri, A. and Novian, R. (2017) 'Determined Slum Upgrading: A Challenge to Participatory Planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia', *Sustainability*, 9(7), p. 1261. Available at: <https://doi.org/10.3390/su9071261>.
- Surya, B. *et al.* (2021) 'Handling slum settlement based on community participation and socio-cultural change: Perspective of sustainable development of Makassar City, Indonesia', *Geographica Pannonica*, 25(4), pp. 300–316. Available at: <https://doi.org/10.5937/gp25-33038>.
- Widyastuty, A.A. and Ramadhan, M.E. (2019) 'Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrembangan Kota Surabaya)', *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.25105/pwkb.v1i1.5273>.